

## DINAMIKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Yofitri Heny Wahyuli<sup>1)</sup>; Dian Novita Fajar Sari<sup>2)</sup>; Andela Anggleni<sup>3)</sup>  
<sup>123</sup> STIA Satya Negara Palembang

Email: [Azza.dum@gmail.com](mailto:Azza.dum@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [04 Desember  
2022]

Revised [31 Desember 2022]

Accepted [26 Januari 2023]

### KEYWORDS

Implementation, Policy,  
Poverty, Distribution

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



### ABSTRAK

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan disini mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Berbagai program yang telah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Namun, dalam tahapan pelaksanaan kebijakan ternyata masih banyak menemui berbagai hambatan dan kendala. Pendistribusian bantuan sosial yang belum tepat sasaran (bias distribusi) adalah salah satu masalah utama yang harus dapat segera dicarikan solusi terbaiknya. Bias distribusi ini disebabkan karena adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas pelaksana program yang ada di lapangan (*street level bureaucracy*). Kondisi ini telah berdampak pada pencapaian target penurunan angka kemiskinan yang belum optimal.

### ABSTRACT

*Poverty Reduction Policies here have a very strategic role in efforts to increase poverty reduction in Indonesia. Various programs have been created and run by the government in various forms over a long period of time. However, in the implementation phase of the policy, it turns out that there are still many obstacles and obstacles. The distribution of social assistance that has not been properly targeted (distribution bias) is one of the main problems that must be immediately found the best solution. This distribution bias is caused by the discretion of the program implementing officers in the field (street-level bureaucracy). This condition has had an impact on the achievement of the poverty reduction target which has not been optimal.*

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pemerintah daerah banyak hal dari faktor kemiskinan dan salah satu contohnya ada karena malas untuk berusaha dan sengaja untuk dimiskinkan. Sama hal seperti di kabupaten yang lain kemiskinan menjadi pokok masalah padahal kalau dilihat dari kekayaan alam kita, negara Indonesia tidaklah pantas memiliki rakyat yang begitu banyak untuk menderita karena kemiskinan. Isu kemiskinan merupakan salah satu isu global yang selalu menjadi perhatian bersama. Bahkan dalam kegiatan pembangunan global yang lebih dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah menetapkan salah satu tujuan (goals) SDGs/TPB dari 17 goals yang ada yaitu mewujudkan “tanpa kemiskinan (*no poverty*)” di Tahun 1930. Target “tanpa kemiskinan” ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap negara di dunia untuk dapat mencapainya.

Dalam konteks negara Indonesia, hal ini sudah di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang selalu menjadi fokus utama pemerintah di dalam menyusun kebijakan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti perlu ada intergrasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait. Dalam hal kebijakan Penanggulangan kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010. Pemerintah secara sistematis telah membagi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan sektor yang akan dilakukan intervensi. Sementara itu secara berjenjang di tingkat pusat telah di bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dipimpin oleh Wakil Presiden sebagai Ketua dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD) yang di pimpin oleh Wakil Walikota/Wakil Bupati seluruh Indonesia. Harapan yang muncul adalah dengan adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang semakin cepat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Asumsi (mindset) tergantung pada orang lain serta menganggap terjadinya kemiskinan karena akan memperpanjang budaya kemiskinan dan menistakan harkat martabat sebagai manusia berdaya. Di sisi lain, pandangan-pandangan seperti orang miskin itu bodoh, pemalas, suka minta-minta, dan akan makin menenggelamkan posisi warga miskin ke dalam jurang ketidakberdayaan dan menyulitkan tumbuhnya semangat kebangkitan bagi warga miskin untuk mampu sendiri menanggulangi kemiskinan pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin perlu terus dilakukan sampai pada terwujudnya kemandirian masyarakat miskin dalam menyelesaikan persoalan kehidupannya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin tidak hanya bertumpu pada peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumberdaya, namun harus disertai dengan perbaikan sikap, mental, dan perilaku (transformasi sosial) masyarakat miskin itu sendiri dari ketergantungan menuju ke arah kemandirian.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan.

Berdasarkan data BPS RI dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir penurunan angka kemiskinan telah menunjukkan tren yang positif. Tahun 2013 sebesar 11,36%, tahun 2014 sebesar 11,25% tahun 2015 sebesar 11,22% tahun 2016 sebesar 10,86% dan tahun 2017 sebesar 10,64%. Namun secara persentase, angka penurunan kemiskinan setiap tahunnya masih relatif kecil yaitu di bawah 1 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa implementasi program penanggulangan kemiskinan belum berjalan secara optimal, kondisi yang sama juga terjadi di tingkat daerah. Berdasarkan data yang ada, pemerintah daerah pada umumnya masih mengalami kesulitan untuk menurunkan angka kemiskinan di atas 1 (satu) persen setiap tahunnya. Kondisi ini diperkuat pula dengan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah terkait dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hasil dari beberapa penelitian terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di berbagai negara misalnya Laksmono (1998), Yesudian (2007), dan Yunusa (2012), Rakhmat (2015), menunjukkan bahwa kegagalan disebabkan karena bantuan diberikan tidak tepat sasaran. Berdasarkan penelitian tersebut dikemukakan bahwa ketidak tepatan sasaran tersebut lebih disebabkan karena terjadinya bias implementasi program di tingkat bawah / masyarakat yang dilakukan oleh para petugas di lapangan.

## LANDASAN TEORI

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia (Herlina & Komariah, 2017). Menurut Liwiya et al., (2018) dalam pengentasan kemiskinan pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai merupakan usai penghapusan subsidi minyak tanah, dan program konversi bahan bakar gas, penerangan /lampu, infrakstruktur, air bersih. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Kebijakan pemerintah terkait strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan cukup baik. Hal ini ditandai oleh upaya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian merumuskan program-program pengentasan kemiskinan. Mulai dari masa orde lama hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus berupaya menurunkan jumlah masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan (Murdiyana & Mulyana, 2017). Proses sosialisasi berjalan dengan baik karena didukung oleh kualitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain seperti sarana dan prasarana. Ketepatan waktu implementasi juga semakin lama semakin mengikuti waktu yang diharapkan baik oleh implementor maupun oleh masyarakat. Penghematan biaya dalam proses implementasi program bantuan beasiswa Bidikmisi dapat terjadi karena bentuk organisasi yang kecil. Disamping itu Dikti menyiapkan dana khusus untuk pelaksanaan kebijakan tersebut (Santie & Wahono, 2016).

Sementara menurut Suropto, (2005) Pemerintah daerah perlu mempunyai kebijaksanaan pembangunan yang dilengkapi dengan program redistribusi pendapatan yaitu menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi permasalahan di setiap wilayah dan selanjutnya disusun kebijakan yang relevan. Pemerintah daerah perlu menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi. Program tersebut haruslah sustainable yang juga perlu mempertimbangkan kondisi lokal dimana kemiskinan itu terjadi. Diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam menanggulangi kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai ini memberikan keuntungan baik secara teknis pelaksanaan program serta acuan dan pemahaman dalam rangka pengawasan pembinaan program BPNT, mengetahui keberhasilan program, kemudian memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan program sehingga menjadi bahan evaluasi dan pelaporan. (Sulistiyaningih, et.al. (2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari media dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh untuk penelitian sebelumnya divalidasi melalui *cross check* data dengan teknik triangulasi sumber data. Dalam penelitian ini yang diamati adalah pekerjaan dari pada masyarakat miskin yang ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

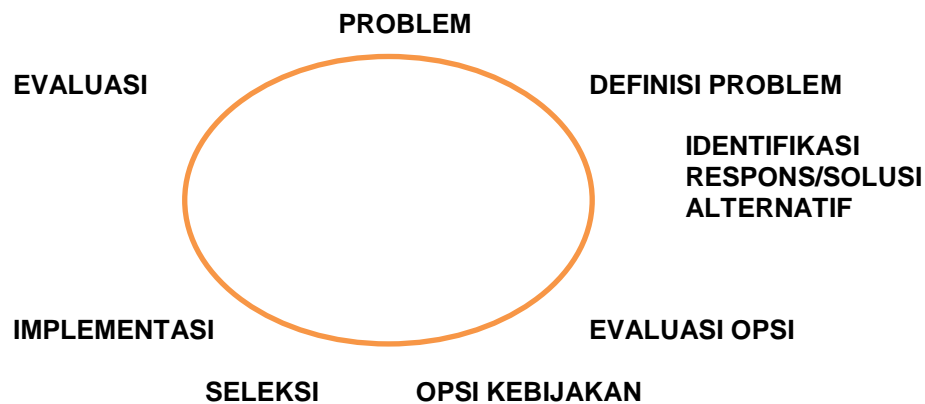
### Proses dan Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Kuari belajar dari pengalaman selama ini, kita menemukan bahwa kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan selama ini harus diubah. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa yang harus menjadi aktor utama untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran kemiskinan adalah masyarakat miskin itu sendiri, bukan pemerintah ataupun pihak lain. Untuk itu, masyarakat miskin harus ditingkatkan kemampuannya untuk kemudian diberdayakan dan ditingkatkan kemandiriannya. Kenyataan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat justru memberikan hasil yang lebih efektif dan tingkat keberlanjutannya jauh lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh proyek seperti biasa. Pengalaman kebijakan penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa bila masyarakat miskin diberikan peluang yang sebesar besarnya untuk menentukan arah yang mereka sukai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, maka masyarakat miskin akan bergiat bahkan tidak ragu-ragu untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut. Rasa kepemilikan terhadap program akan lebih kuat dan ada perasaan bahwa mereka dihargai untuk menentukan sendiri. Menurut Thomas R. Dye (2005) mengemukakan bahwa kebijakan adalah *"whatever governments choose to do or not to do"*. Hal ini dapat dipahami bahwa secara umum kebijakan memiliki makna yang cukup luas. Segala bentuk tindakan atau keputusan yang di pilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah kebijakan. Pada saat pemerintah

memilih untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, artinya pemerintah telah mengambil sebuah kebijakan.

Laksmono dan Rakhmat (2018) menguraikan bahwa kebijakan publik secara normatif adalah implementasi dari serangkaian tahapan dan tingkatan proses pencapaian hasil (*output*) program-program kebijakan negara. Selanjutnya dikemukakan bahwa keadilan sosial dan kebijakan publik merupakan dua hal pokok yang saling berkaitan. Hadirnya kebijakan publik dapat berimplikasi pada terwujudnya keadilan di masyarakat. Selanjutnya, Parson (2008) menggambarkan proses kebijakan sebagai sebuah siklus yang dinamakan siklus hidup kebijakan. (lihat gambar 1). Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa sesungguhnya proses kebijakan merupakan suatu siklus yang bersifat dinamis dan terus berjalan seiring dengan perkembangan kondisi dan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Diawali dari adanya permasalahan (*problem*), kemudian di pilih alternatif langkah yang akan di ambil, kemudian pilihan tersebut di implementasikan. Setelah di implementasikan, langkah selanjutnya yaitu kebijakan akan di evaluasi. Dari hasil evaluasi, akan diperoleh informasi sejauh mana program atau kebijakan berimplikasi di masyarakat.

**Gambar 1 Siklus Hidup Kebijakan**



Sumber: Parson, 2008, p.80

Sementara itu Jamrozik (2001) menggambarkan sebuah proses kebijakan dalam sebuah arus kebijakan (*direction of policy flow*) yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan (*level*). Adapun tingkatan pertama yaitu ruang politik (*political sphere*), tingkatan kedua yaitu ruang administratif (*administrative sphere*) dan tingkatan ketiga yaitu ruang operasional (*operational sphere*).

**Gambar 2. Kebijakan dalam Operasi: Ruang Kegiatan**

	Sphere of activity	Means/Instruments	Actors involved
Directions of policy flow ↓	Level 1: Political Sphere (policy formulation)	LEGISLATION FUNDS	Interest (lobby) groups, political parties, politicians, ministers
	Level 2: Administrative sphere (policy interpretation)	REGULATIONS INTRUCTIONS	Govt bureaucracy, statutory bodies, non-government organisations
	Level 3: Operational sphere (policy application)	INDIVIDUAL SERVICE PERSONAL/MATERIAL	Service providers: professionals academics, teachers, doctors, social workers, etc. lower-level bureaucracy
	<b>Public served</b>	<b>RECEIVING END</b>	<b>Public at large</b>

Sumber : Jamrozik (2001, p.53)

Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat diketahui bahwa tingkatan pertama yaitu ruang politik sebagai tempat kebijakan diformulasikan yang melibatkan berbagai aktor diantaranya jajaran pemerintah

pusat (pihak eksekutif), para politikus (pihak legislatif) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Pada tingkatan pertama ini sebuah kebijakan akan lahir untuk diimplementasikan. Sebagai instrumen atau kelengkapan di dalam pengambilan kebijakan ini adalah terkait undang-undang/peraturan pendaan (*legislation funds*). Sedangkan pada tingkatan kedua yaitu ruang administratif yang merupakan tempat sebuah kebijakan di intepretasikan yang melibatkan aktor diantaranya birokrasi pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah (NGO). Sebagai instrumen/kelengkapan pada tahapan ini adalah adanya regulasi atau intruksi. Selanjutnya pada tingkatan ke tiga yaitu ruang operasional merupakan tahapan kebijakan diimplementasikan langsung oleh para pegawai atau pelaksana. Aktor yang terlibat pada tahapan ini diantaranya para akdemisi, guru, dokter, pekerja sosial, birokrasi tingkat bawah (*lower level bureaucracy*). Setelah melalui tingkatan yang ke tiga maka masyarakat akan menerima layanan yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan (implementator).

### **Birokrasi Tingkat Bawah (*Street Level Buereucracy*)**

Di dalam kajian implementasi kebijakan publik, kita mengenal istilah birokrasi tingkat bawah *street level bureaucracy* yang dikemukakan oleh Lipsky (1980). Sementara Jamrozik (2001) menggunakan istilah *lower level bureaucracy*. Keberadaan *street level bureaucracy* ataupun *lower level bureaucracy* menggambarkan birokrasi yang dijalankan oleh para implementator kebijakan yang berada pada tingkatan di bawah. Hal yang menarik terkait mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu menggunakan diskresi (*discretion*). Langkah ini mereka nilai sebagai sebagai sebuah solusi dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) ataupun petunjuk teknis (juknis) yang telah ditentukan.

Secara konseptual, Lipsky (1980,p.15) mengemukakan bahwa "*Discretionis a relative concept. It follows that The greater the degree of discretion the more salient this analysis in un-derstanding The character of workers" behavior.*" Kondisi ini dapat dipahami bahwa diskresi adalah sebuah konsep yang relatif. Semakin besar tingkat diskresi maka semakin penting analisisnya dalam memahami karakter perilaku pekerja. Lebih lanjut diuraikan terkait dengan keberadaan diskresi ini adalah bahwa diskresi adalah ciri khas dari birokrat tingkat bawah dan sepertinya ini sulit untuk dihilangkan dari mereka. Hal ini karena mereka melibatkan pekerjaan yang kompleks yang mana pengelaborasi aturan, pedoman, atau instruksi tidak dapat membatasi pilihan (alternatif) yang ada.

Ada beberapa alasan mengapa diskresi ini tidak dapat dihilangkan dari para pekerja/birokrat di tingkat bawah. Hal ini didasari alasan antara lain pertama, birokrat tingkat jalanan sering bekerja dalam situasi terlalu rumit untuk mengurangi pola yang telah terprogram. Kedua, birokrat tingkat jalanan bekerja dalam situasi yang sering membutuhkan respon terhadap dimensi situasi kemanusiaan. Ketiga, lebih pada fungsi pekerja tingkat bawah yang berinteraksi dengan warga daripada dengan tugas yang sesungguhnya. Kebijaksanaan tingkat jalanan (*street level*) mendukung harga diri pekerja itu sendiri dan mendorong klien untuk percaya bahwa para pekerja memegang kunci untuk kesejahteraan para klien (*the keytotheir well being*). Jika dipahami lebih jauh, di satu sisi munculnya diskresi yang dilakukan Oleh para petugas di tingkat bawah pada dasarnya dapat dijadikan sebagai sebuah solusi dalam mengatasi situasi sulit yang mereka hadapi di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah. Namun di sisi yang lain, munculnya diskresi di kalangan petugas di tingkat bawah yang dilakukan tidak secara arif dan bijaksana justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Bahkan justru program yang di jalankan oleh pemerintah tidak berjalan optimal dan tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Kondisi ini yang sesungguhnya harus mendapat perhatian dari pemerintah, terutama oleh pemerintah pusat. Jangan sampai penggunaan diskresi yang tidak tepat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan dijumpai di setiap pelaksanaan distribusi bantuan pada program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dalam upaya percepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, maka perlu dilakukan perbaikan di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini utamanya terkait distribusi bantuan di tingkat masyarakat desa/kelurahan. Ketepatan sasaran merupakan kunci utama agar program yang telah dilakanakan dapat memberikan dampak yang optimal. Kondisi yang sering terjadi di tingkat bawah / masyarakat yaitu adanya bias pelaksanaan di dalam distribusi bantuan yang disebabkan adanya diskresi di kalangan petugas. Penggunaan diskresi yang

dilakukan oleh para implementator di tingkat bawah (*street level bureuacracy*) perlu dilakukan pengawasan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperlukan agar ke depan, pemerintah dapat menjamin bahwa distribusi bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masyarakat perlu di dukung oleh koordinasi implementator di lapangan dan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R. (2005). *Understanding Public Policy*. Pearson Educations, Inc. New Jersey.
- Herlina, N., & Komariah, M. (2017). *Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(2), 260–277. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.821>
- Hutagaol, Parulian dan Alla Asmara. 2007, *Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin : Studi Kasus Pelaksanaan Program Raskin di Propinsi Jawa Barat pada Tahun 2007*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 26 Nomor 2, Oktober 2008:145–165
- Jamrozik, Adam, (2001). *Social Policy In The Post Welfare State* Longman. Australia.
- Laksmono, Bambang Shergi. (1999). *Permasalahan Akses Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan*, Disertasi, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Laksmono, Bambang Shergi dan Rakhmat, (2018). *Manajemen Keadilan–Bias Birokrasi Dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan*, UI Publishing, Jakarta.
- Lipsky, Michael. (1980). *Street Level Bureaucracy - Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation, New York.
- Lister, Ruth. (2004). *Poverty*. Polity Press. United Kingdom.
- Liwiya, Y., Pangkey, M. S., & Tampi, G. B. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua)*. Jurnal Administrasi Publik, 4(50). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19034>
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publication Inc. London.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy – Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rakhmat, (2015). *Permasalahan Distribusi Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan-Studi Pada Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Palembang*, Disertasi, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Santie, J. K., & Wahono, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado*. Jurnal Manajemen Dan Adiministrasi Publik, 1(2), 183–192. <https://doi.org/10.37507/map.v1i02.94>
- Suripto, A. S. (2005). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In Tesis. <http://eprints.ums.ac.id/6781/1/R100020052.pdf>
- Sulistyaningsih, Wiwit Tri, dan Kamil, Muhammad, (2020). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Baru*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13 (1); 1 – 12.
- SMERU, (2008). *Efektivitas Pelaksanaan Raskin*, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Yesudian, C.A.K, (2007), *Poverty alleviation programs in India: A social audit*, Indian Journal of Medical Research, 126 (4), 364-73. India.

### Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan